

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan. Dimana upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan kumuh baru apabila tidak ditangani secara intensif. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang. Kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai.

Kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan ekonomi dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih untuk menciptakan perubahan serta menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) merupakan program salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Tidak pernah lepas dari kehidupan, Livelihood merupakan istilah generik yang mengandung makna

“penghidupan”. Livelihood dalam konteks pembangunan berarti menggambarkan kemampuan (capabilities), kepemilikan sumber daya (sosial dan material), dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya (Ramli, 2007). Secara etimologis, livelihood dapat diartikan sebagai aset (alam, manusia, finansial, sosial dan fisik), dan aktifitas dimana akses atas aset dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mendikte hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga (Seragih, dkk 2007).

Fokus utama perkembangan ekonomi adalah guna meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar perekonomian di pemukiman perkotaan dengan mewujudkan pemukiman perkotaan yang layak huni produktif dan berkelanjutan dalam segi ekonomi masyarakat. (Kementrian PUPR, 2016).

Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil yang secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. Perkembangan kota proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda yang dapat dicirikan dari penduduk yang makin bertambah dan makin padat, pembangunannya yang semakin rapat permukiman yang cenderung semakin luas, semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota. Permukiman kumuh menjadi masalah yang di hadapi di Kota Surabaya (Sadyohutomo dalam Sadana, 2014).

Surabaya merupakan Ibu Kota Jawa Timur dengan luas wilayah 326,81 km persegi dan kepadatan penduduk 8.798 jiwa/km persegi. Secara administrasi, Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dengan 154 kelurahan. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan, jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2,87 juta jiwa. Sebanyak 1,43 juta jiwa atau 49,58% penduduk Surabaya berjenis kelamin laki-laki. Sementara, 1,45 juta jiwa atau 50,42% penduduk di kota tersebut adalah perempuan. Tidak lepas dari wilayah Surabaya bagian Utara para urban yang bermukim di daerah tersebut menyebabkan permukiman wilayah tersebut menjadi

kumuh dan jalan menjadi sempit. (bappeko.surabaya.go.id)

Kampung Pelangi Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya terbilang kumuh, tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah. Keadaan tersebut menjadi alasan diterapkannya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Kotaku yaitu: perbaikan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan tak luput pemberdayaan ekonominya. Akan tetapi, ada fakta lapangan yang ditemukan seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua RT Kampung Pelangi, yang bernama Sahih Maulana (47 Tahun) yang mengatakan:

“Program Kotaku yang pernah dilaksanakan di kampung sini dulu janji pemerintah adalah agar kami bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih layak dengan dibekali pelatihan-pelatihan umkm untuk istri-istri nelayan dan pedagang, tapi pada faktanya hanya setahun dua tahun kemudian tidak lagi mbak, kami merasa sebagai orang yang minim ilmu dan dana butuh sekali bantuannya.” (Sumber Dony Rustandy, rumah Dony Rustandy, Kampung Pelangi, 2022).

Iniilah yang merupakan salah satu fokus keberlanjutan yang masih di pertanyakan “pemberdayaan ekonomi”. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya merasa realisasi pemukiman membuat mereka merasa kehilangan lahan tempat mereka biasa mencari pendapatan. Winarno (51 Tahun) salah satu warga yang tinggal di Kampung Pelangi mengatakan:

“Kami ini hanya masyarakat miskin, tujuan kami datang ke kota berharap kehidupan akan berubah jauh lebih baik, 20 tahun saya merantau dan tinggal di kampung ini, saat program itu ada, rumah saya di perbaiki mbak, tapi ya gitu dulu istri saya jualan di depan gang dekat arah pesisir pantai banyak orang nongkrong sore disana lumayan dapat pemasukan, tapi setelah dibangun itu sudah ndak bisa jualan lagi mbak, sempat ada pembekalan tapi sirna setelah pandemi sampai sekarang” (Sumber: Winarno, rumah Dony Rustandy, Kampung Pelangi, 2022).

Pembangunan berbasis infrastruktur tidak pernah terlepas dari society (masyarakat) (Sadana, 2018). Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan sampai keberlanjutan pembangunan infrastruktur KOTAKU (kota tanpa kumuh) dan dengan tetap berpedoman pada konsep pembangunan

berkelanjutan. Maka dari itu, sesuai dengan Ilmu Ekonomi Pekotaan dengan adanya program ini maka masyarakat yang berada dalam lingkup kerja KOTAKU masih mempertanyakan terkait nasib keberlanjutan mereka yang merasa kehilangan lahan pekerjaan akibat realisasi pemukiman dan Pembangunan Infrastruktur.

Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlu adanya penelitian tentang analisis dampak pembangunan berbasis infrastruktur program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Pelangi, Kota Surabaya sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakatnya yang jauh lebih terarah. Terkhusus lagi pada dampak positif dan negatif dalam segi ekonomi yang dihasilkan dari program ini yang akan menjadi objek analisis peneliti.

1.2.Rumusan Masalah

Pelaksanaan program KOTAKU pada saat ini hanya berfokus pada penataan bangunan dan kelayakan tempat pemukimannya saja, bagaimana masyarakat bisa keluar dari lingkaran kemiskinan jika tidak memperhatikan keberlanjutan dalam segi ekonominya guna memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan program KOTAKU di wilayah tersebut. Program KOTAKU memiliki potensi yang besar jika dikembangkan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Konsep pembangunan livelihood ini kemudian “dicangkokkan” kedalam pendekatan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) sebagai resep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Adanya permasalahan sosial, dan ekonomi di Kampung Pelangi, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya untuk dapat menganalisis dalam Pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana dampak pelaksanaan program kotakau di Kampung Pelangi, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di segi pemberdayaan ekonomi masyarakatnya?.

1.3.Tujuan Penelitian

Hadirnya persoalan yang mencakup sosial, dan ekonomi di Kampung Pelangi, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Memberikan hasil sebuah rumusan masalah yang menjadi inti penelitian. Hasil dari rumusan masalah di atas, menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program kotaku di Kampung Pelangi, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di segi pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin di capai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini tentunya di harapkan guna menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan

2. Bagi akademis

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberi manfaat pengetahuan bagi akademisi serta dapat menjadi refrensi untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Kementrian PUPR Kota Surabaya terkait pengembangan Penataan pemukiman kumuh dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya yang berbasis atau berkonsep Pembangunan berkelanjutan.